

# SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA BANJARMASIN

**Ahmad Hanafi, Fakhsiannor, Normajatun**

Ilmu Administrasi Publik, 63201, fisip, Uniska, 16120341

Ilmu Administrasi Publik, 63201, fisip, Uniska, 1120106301

Ilmu Administrasi Publik, 63201, fisip, Uniska, 1116116301

Email : [hanafiboys009@gmail.com](mailto:hanafiboys009@gmail.com)

## ABSTRAK

AHMAD HANAFI, NPM. 16.12.0341 "Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Banjarmasin." Bimbingan Bapak Fakhsiannor sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Normajatun sebagai Co Pembimbing.

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui gambaran Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kota Banjarmasin, ditinjau dari sistem informasi manajemen dalam sistem informasi administrasi kependudukan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi hingga pada penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum SIAK pada Dukcapil Kota Banjarmasin berjalan dengan baik. Berdasarkan empat indikator sub sistem yang digunakan yaitu perencanaan strategis, operasi sistem informasi, pengendalian manajerial, pengolahan transaksi. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kota Banjarmasin secara mrnyeluruh sudah baik, tetapi pada indikator perencanaan strategis masih kurang dari segi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat

*Kata Kunci : SIAK, Perencanaan Strategis, Operasi sistem Informasi, Pengendalian manajerial, Pengolahan transaksi*

## ABSTRACT

AHMAD HANAFI, NPM. 16.12.0341 "Population Administration Information System Population and Civil Registry office in the city of Banjarmasin." Guidance of Mr. Fakhsiannor as Principal Advisor and Mrs. Normajatun as Co Advisor.

*The purpose of this study was to determine the description of the Application of Population Administration Information System in the Population and Civil Registry Office of Banjarmasin City, in terms of the management information system in applying the population administration information system in this study using a descriptive qualitative approach. Data collection is done through interviews, observations, documentation to the conclusion.*

*The results showed that in general SIAK at the Department of Population and Civil Registration of the City of Banjarmasin went well. Based on four sub-system indicators used, namely strategic planning, information system operations, managerial control, transaction processing. In this case it can be seen that the Population Administration Information at the Population and Civil Registry Office of the City of Banjarmasin as a whole is good, but the strategic planning indicators are still lacking in terms of the benefits felt by the community.*

*Keyword : SIAK, Strategic Planning, Operating system Information, Managerial Control , Transaction Processing*

## I. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Manfaat diterapkannya *e-government* pada setiap lapisan adalah meningkatkan fungsi pelayanan publik serta meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan secara langsung meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian informasi yang dihasilkan akan menjadi lebih lengkap, cepat dan akurat dengan biaya yang lebih efisien dalam pengelolaan data dan pencarian data/informasi.

Sistem konektivitas sistem administrasi kependudukan bisa berupa *on-line* yaitu komunikasi data antar komputer tersambung secara terus menerus dalam kurun waktu 24 jam yang menggunakan teknologi *leased line*, selanjutnya bisa secara semi *off-line* yaitu komunikasi data antar komputer tersambung sesuai kebutuhan, misalnya seminggu sekali, atau sebulan sekali dengan menggunakan telepon dan modem, sedangkan konektivitas secara *off-line* yaitu komunikasi data antar komputer dilakukan secara manual melalui disket, USB atau CD.

Berlakunya otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, di dalam UU ini, terdapat peraturan mengenai pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintah, urusan pemerintah (baik yang berupa klarifikasi urusan pemerintahan, urusan pemerintahan absolut, dan urusan pemerintahan konkuren serta urusan pemerintahan umum).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, maka disusunlah sebuah penelitian Skripsi dengan judul : “Penerapan Administrasi Kependudukan Di Kantor Dukcapil Kota Banjarmasin”.

### I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Administrasi Kependudukan Di Kantor Dukcapil Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana Proses Penerapan Administrasi Kependudukan Di Kantor Dukcapil Kota Banjarmasin?
3. Apa saja yang diupayakan pemerintah agar efektif dalam Penerapan Administrasi Kependudukan Di Kantor Dukcapil Kota Banjarmasin?

### I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bagaimana Penerapan Administrasi Kependudukan Di Kantor Dukcapil Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
3. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran jelas tentang Penerapan Administrasi Kependudukan Di Kantor Dukcapil Kota Banjarmasin.

## II. METODE PENELITIAN

### II.1 Pendekatan Penelitian

Penggunaan Metode Kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang akan dikaji yaitu Penerapan Administrasi Kependudukan Di Kantor Dukcapil Kota Banjarmasin sehingga data yang diperoleh lebih mendalam.

### II.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Dukcapil Banjarmasin. Adapun pelaksanaan penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan November 2019 hingga Januari 2020.

### II.3 Sumber Data dan Informan

#### 1. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang memberikan informasi mengenai Berdasarkan sumbernya, data dibedakan 2, yaitu data Primer dan Sekunder :

- Sumber Data Primer
- Sumber Data Sekunder

#### 2. Informan

Informan adalah orang yang berada pada penelitian.

### II.4 Metode Pengumpulan Data

- Observasi
- Wawancara
- Dokumentasi

### II.5 Metode Analisis Data

- Pengumpulan informasi melalui wawancara
- Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti
- Penyajian Data
- Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi

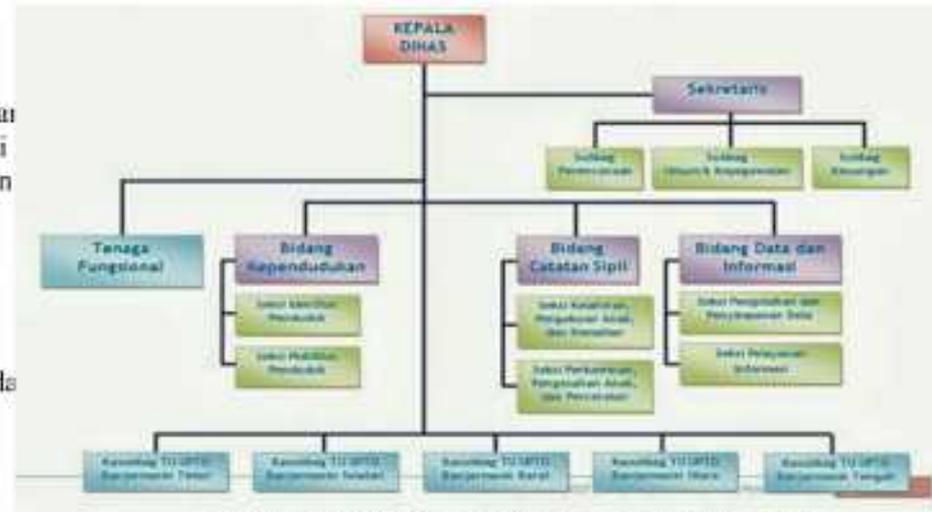
## III. ANALISIS HASIL PENELITIAN

### III.1 Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin

Pelayanan yang diberikan oleh Dukcapil mencakup pembuatan dokumen pencatatan sipil dan pelayanan administrasi kependudukan.

Kota Banjarmasin yang terkenal dengan sebutan "Kota Seribu Sungai" mempunyai banyak sungai dan anak sungai yang digunakan sebagai sarana transportasi dan penggunaan lainnya seperti mandi, cuci dan lainnya, selain penggunaan jalan darat yang sudah ada. Guna memberikan akses yang lebih cepat dalam pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pembangunan Kota Banjarmasin, berdasarkan wilayah administrasi saat ini Kota Banjarmasin dibagi menjadi 5 wilayah kecamatan,

52 wilayah kelurahan, 117 Rukun Warga. Luas Kota Banjarmasin data terdahulu tercatat 72,00 km<sup>2</sup>, dengan pemetaan terbaru via satelit, ternyata luas Kota Banjarmasin sebenarnya seluas 98,46 km<sup>2</sup> dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan luas sekitar 38,87 persen terhadap luas wilayah Kota Banjarmasin. Kecamatan dengan luas terkecil adalah Banjarmasin Tengah dengan luas wilayah hanya 6,66 km<sup>2</sup> atau sekitar 6,76 persen dari luas wilayah Kota Banjarmasin.



Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Dinas Banjarmasin

Tabel Pejabat Struktural Dukcapil Kota Banjarmasin

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Khairul Saleh, M.Si	Kepala Dinas
2.	Drs. Rizanie Setiawan	Sekretaris
3.	Drs. M. Yusuf Efenndi	Kabid Pelayanan Penda
4.	Ir. Halida Kamaliah	Kabid Pelayanan Capil
5.	Fakriawaty, S.Sos., MA	Kabid Pengelolaan IAK
6.	Drs. Zainal Hakim	Kabid Pemanfaatan pelayanan
7.	Diah Kumalasari, S.Si	Kasubbag Perencanaan
8.	Hj. Mursidah, SE	Kasubbag Keuangan
9.	Esty Ratnaningtyas, S.Sos	Kasubbag Umum Kepe
10.	Puji Rahayu, SH	Kasi Identitas Pendudu
11.	Noor Hasanah, SE	Kasi Pindah Data Penduduk
12.	Hj. Ida Chairiati, S.Sos., M. AP	Kasi Kelahiran dan Ker
13.	Y. Yoyong Dwi W., S.Sos	Kasi Perkawinan, Perc Status Anak, dan Kewa
14.	Rusida Liyantie, S.IP	Kasi Siak

15.	Dra. Mawarti	Kasi Pengolahan & Penyajian Data
16.	Heridha Risanti, SE	Kasi Kerjasama & Inovasi Pelayanan
17.	Asna Thohiroh, S.Kom	Kasi Pemanfaatan Daya kepada Masyarakat Kependudukan
18.	Gt. Effi Mahariani	Kepala UPT Pel. Selatan
19.	Nana Mariana ramli, SE	Kepala UPT Pel. Timur
20.	Anisah, SE	Kepala UPT Tengah
21.	Barat Guzali	Kepala UPT Pel. Barat
22.	Utara Faridah, S.Sos	Kepala UPT Utara

Dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, Dukcapil Kota Banjarmasin berusaha memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya kepada masyarakat. Untuk meningkatkan produktivitas pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan di Kota Banjarmasin maka Dukcapil Kota Banjarmasin melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mendata semuaarganya baik pendataannya di laksanakan di Dukcapil Kota Banjarmasin maupun pendataan yang dilaksanakan di masing – masing kecamatan di kota Banjarmasin kemudian data tersebut bisa langsung di kirim ke Dukcapil Kota Banjarmasin. Dalam mendukung pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan maka Dukcapil Kota Banjarmasin memiliki SIAK yaitu untuk dapat membantu proses kinerja yang di hasilkan oleh pegawai agar dapat tercapainya penerbitan dokumen dengan cepat dan tepat kepada masyarakat.

### III.2 Jenis-Jenis Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kota Banjarmasin

#### 1. Bidang Pencatatan Sipil

- 1) Akta Kelahiran
- 2) Akta Kematian
- 3) Akta Perkawinan
- 4) Akta Perceraian Perceraian
- 5) Akta Pengakuan Anak
- 6) Akta Pengangkatan Anak
- 7) Akta Pengesahan Anak
- 8) Pembatalan akta pencatatan sipil
- 9) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan
- 10) Pembetulan akta pencatatan sipil
- 11) Perubahan nama

#### 2. Bidang Kependudukan

- 1) Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
- 2) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 3) Penerbitan SKKT (Surat Keterangan Tempat Tinggal) WNA yang memiliki Izin Tempat Tinggal Terbatas (KITAS) dan yang memiliki izin tinggal tetap (KITAP), 14 hari sejak memiliki kitas/ kitab wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dicatatankan biodatanya dengan menggunakan atau mengisi formulir pendaftaran orang asing tinggal terbatas. Setelah dicatatankan biodatanya di database WNA pemegang Kitas akan ditertibkan SKTT.
- 4) Penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan.

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh KABID Pelayanan Pendaftaran Penduduk Drs. M. Yusuf Efendi dan Riza Wahyudi sebagai Pegawai Bidang Operasional bahwa :  
 “jadi keini mas Program kami itu mendekatkan kepada masyarakat untuk mendata semua warga yang belum melakukan perekaman dan kami mengundang masing – masing lewat kecamatan dari warga seluruhnya baik di kecamatan maupun di Dukcapil dan juga dispendukcapil Kota Banjarmasin ini juga melayani dengan Pelayanan Administrasi Kependudukan secara keliling dengan menggunakan mobil yang berkeliling kota Banjarmasin Hal ini dimaksudkan agar data- data penduduk dapat jelas dan teratur, dengan adanya dokumen kependudukan masyarakat secara sah mendapat pengakuan dari negara. Maka dari Dukcapil Kota Banjarmasin selalu memberikan program-program yaitu mensosialisasi pentingnya tertib administrasi dan melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat melalui kecamatan-kecamatan di Kota Banjarmasin paling tidak untuk mendata warganya yang belum perekaman pasti satu bulan itu pasti ada untuk melakukan pendataan. tetapi masyarakat kita ini rancak kada sadar pentingnya beulah data kependudukan ni, pas ada perlunya hanyar beulah, padahal penting gasan meurus bila handak kawin,melamar begawi, dll. Pas handak perlu hanyar meurus ujar Riza Wahyudi dalam bahasa banjar, sebagai pegawai di bidang operasional” (Hasil wawancara kamis, 9 Januari 2020 )

### III.3 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### 1. Produktivitas

Adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini juga membantu dalam percepatan penerbitan dokumen kependudukan. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan

oleh Ir. Halida Kamaliah Kepala Bidang Pencatatan Sipil bahwa :

“Dengan adanya SIAK semua data lebih teratur dan dalam penerbitan dokumen kependudukan lebih cepat mas. Biasanya untuk penerbitan dokumen itu setelah adanya program SIAK ini jadinya satu hari bisa, soalnya sekarang ini Dukcapil mencanangkan one day service. Kalau sebelum menggunakan SIAK untuk penerbitan dokumen semuanya biasanya memerlukan waktu paling lama satu minggu mas”. (Hasil wawancara 9 Januari 2020)

Puji Rahayu, SH juga menjelaskan bahwa :

“Adanya penerapan SIAK ini sangat membantu pelayanan penerbitan dokumen yang kami lakukan. Semua penerbitan dokumen kependudukan dapat kami selesaikan dengan lebih cepat. Masyarakat tidak perlu menunggu berhari-hari untuk memperoleh dokumen kependudukan. Selain itu data-data kependudukan yang kami simpan sebagai arsip dapat tertata dengan teratur dan sistematis”. (Hasil wawancara Kamis, 9 Januari 2020)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui dengan pengelolaan administrasi kependudukan yang menggunakan SIAK sebagai sistem informasi untuk mengelola data kependudukan akan menjadi lebih mudah dan rapi dalam pendokumentasian dan penyusunan laporan sehingga efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan bisa optimal dan lebih terjamin akurasi dan validitas datanya. Dan dengan layanan ini, masyarakat yang akan membuat penerbitan dokumen yaitu KTP, KK, dan Akta Kelahiran langsung datang ke mobil tersebut. Sehingga dokumen kependudukan yang mereka butuhkan dapat mereka peroleh secara cepat. Dan masyarakat tidak perlu datang ke Dukcapil. Tetapi dalam proses kinerjanya dalam penerbitan dokumen khususnya e-ktp kurang optimal karena kekurangan pegawai, maka pihak Dukcapil Kota Banjarmasin adanya tambahan lagi terhadap pegawai pada bidang penerbitan dokumen kependudukan pada pengurusan e-KTP agar pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan lebih cepat.

Sebagai bukti pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan dapat terlihat dari jumlah penerbitan dokumen kependudukan pada tahun 2018 sebagai berikut :

No.	Garis Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Triwulan				Realisasi	% Capaian
					1	2	3	4		
1.	Tertagapnya peningkatan pelayanan dokumen administrasi kependudukan kepada masyarakat	% Kepala Keluarga yang telah Memiliki Kartu Keluarga	%	100%	25	50	75	100	97,17	97,17
		% Penduduk Usia 17 Tahun yang telah Memiliki KTP Elektronik	%	100%	25	50	75	100	75,81	75,81
		% Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran per 1000 Penduduk	%	77,89%	62,45	67,55	72,65	77,79	60,24	77,44
		% Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh rumah kelahiran yang Terdaftar	%	85,71%	21,43	42,86	64,29	85,71	68,82	80,96

## 2. Responsivitas

Responsivitas dapat dikatakan rendah apabila dalam pemberian pelayanan tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat, maka dengan sendirinya masyarakat akan menilai bahwa kinerja dari dinas tersebut buruk.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dukcapil Kota Banjarmasin dituntut mampu merespon semua keluhan dan tanggapan dari masyarakat baik dalam hal penerbitan dokumen kependudukan maupun pelaksanaan administrasi kependudukan lainnya. Adanya keluhan atau kritik dan saran dari masyarakat dapat diketahui sejauh mana kinerja Dukcapil Kota Banjarmasin dalam merespon kebutuhan masyarakat di Banjarmasin.

## 3. Akuntabilitas

Dalam penelitian ini, akuntabilitas digunakan sebagai indikator yang menunjukkan kesesuaian antara penerapan administrasi kependudukan yang dilakukan Dukcapil Kota Banjarmasin dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Akuntabilitas publik dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kebijakan/ program Dukcapil Kota Banjarmasin dapat konsisten dengan kehendak masyarakat sebagai pengguna pelayanan kependudukan.

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban Dukcapil Kota Banjarmasin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka semua pihak baik yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus bekerja dengan penuh ketelitian, profesionalitas pegawai dan kedisiplinan. Selain itu kejelasan aturan termasuk kejelasan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang kependudukan sangat diperlukan agar masing-masing pegawai

mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya.

Dukcapil Kota Banjarmasin dalam pelayanan administrasi kependudukan telah bertanggungjawab terhadap para pejabat publik administrasi yang berada di atasnya. Dari pertanggungjawaban terhadap Dukcapil Kota Banjarmasin memperoleh umpan balik dari pusat. Selain bertanggungjawab kepada instansi atasnya yaitu di pusat, maka Dukcapil Kota Banjarmasin juga harus bertanggungjawab terhadap masyarakat. Namun pertanggungjawaban masih belum dilakukan. Dukcapil Kota Banjarmasin hanya sebatas melayani masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

Hasil Kinerja Dukcapil Kota Banjarmasin dalam Penerapan Administrasi Kependudukan.

No	INDIKATOR	KETERANGAN
1	PRODUKTIFITAS	<p>Berjalannya SIAK sehingga penerbitan dokumen lebih cepat dan data kependudukan dapat tersimpan dengan teratur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya Program Pelayanan Administrasi Kependudukan Dukcapil yang memudahkan masyarakat untuk membuat dokumen jadi tidak harus di dinasnya tetapi dapat dengan adanya Pelayanan keliling</li> </ul>
2	RESPONSIVITAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menyampaikan keluhan masyarakat secara langsung</li> <li>Mengadakan pertemuan sekali dengan masyarakat di setiap kelurahan.</li> <li>Melakukan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat tentang penerbitan dokumen kependudukan</li> </ul>
3	AKUNTABILITAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan pertanggungjawaban berupa laporan perbulan dan laporan tahunan.</li> <li>Laporan pertanggungjawaban langsung disampaikan pada instansi</li> </ul>

Kependudukan pada Dukcapil Kota Banjarmasin, yaitu :

- 1) SDM, Disiplin pegawai Dukcapil Kota Banjarmasin perlu ditingkatkan lagi agar terciptanya pelayanan yang baik.
- 2) Sosialisasi, tentang penerapan SIAK seharusnya di lakukan secara berkala, untuk memberikan pemahaman tentang perkembangan SIAK. Selain itu, sosialisasi di lakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah Kota Banjarmasin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Tata Sutabri, 2013. *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Respati Indonesia
- Ehny Sutana, 2003. *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta. Graha Ilmu
- Sahya Anggara, 2012. *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung CV Pustaka Setia
- Ibu Kencana, 2019. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta PT Bumi Aksara
- Ely Indah Mindarti, 2016. *Manajemen Pelayanan Publik*, Malang UJ Press
- Indrajit, 2016 *Konsep dan Strategi Electronic Government* [http://www.academia.edu/30100450/Electronic\\_Government](http://www.academia.edu/30100450/Electronic_Government) diakses pada tanggal 25 Desember 2019.
- Lestari, 2016 *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)* <https://idtesis.com/id/publications/74160/implementasi-pada-instansi-administrasi-kependudukan-siak-di-dinas-kependudukan>

### Artikel Internet

- Bailey, Idtesis, 2018 *Teori Administrasi Publik menurut Bailey* <http://idtesis.com/teori-administrasi-publik-2> diakses pada tanggal 2 Januari 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Administrasi* <https://kbbi.web.id/administrasi.html> diakses pada tanggal 2 Januari 2020
- Disdukcapil Kota Banjarmasin, 2019 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin [http://disdukcapil.banjarmasinkota.go.id/p/blog-page\\_41.html?m=1](http://disdukcapil.banjarmasinkota.go.id/p/blog-page_41.html?m=1) diakses pada tanggal 25

## IV. PENUTUP

### IV.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Penerapan Administrasi Kependudukan pada Dukcapil Kota Banjarmasin sudah bagus.
2. Bentuk penerapan SIAK yang di gunakan pada Dukcapil Kota Banjarmasin yakni dilaksanakannya penataan dan pengelolaan administrasi kependudukan dengan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
3. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penerapan administrasi

Desember 2019

**Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan  
Tentang Disdukcapil Kota Banjarmasin  
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Tentang Administrasi Kependudukan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019

Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan  
Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016, tentang pikiran dan kebebasan berpendapat